

**PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
BERDASARKAN ISAK 35
PADA YAYASAN RAUDLATUL MAKFUFIN (TAMAN TUNANETRA)**

Tri Utami*, Dea Annisa, Dila Angraini

Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

dosen00882@unpam.ac.id, dosen00883@unpam.ac.id, dosen00879@unpam.ac.id

Artikel diterima: 9 Desember 2023, Artikel direvisi: 29 Desember 2023, Artikel disubmit: 31 Desember 2023.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan Yayasan raudlatul Makfufin (Taman Tunanetra) Tujuan dari dilakukannya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada Pembina dan pengurus Yayasan tentang pentingnya standar akuntansi keuangan ISAK 35 dalam proses pencatatan, penyusunan dan pelaporan keuangan entitas yayasan. laporan keuangan suatu entitas seyogyanya dapat bersifat transparan dan akuntabel agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan publik secara umum. Sasaran dari kegiatan ini adalah para Pembina dan pengurus sebanyak 15 orang yang dilakukan pada tanggal 5 November 2023. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, tutorial, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini adalah masih ditemukan kendala yaitu pencatatan dan penyusunan laporan keuangan masih sangat sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk entitas nirlaba dan bagi para pengurus yang sebagian adalah penyandang tuna netra terbatas dalam menggunakan aplikasi akuntansi yang belum didukung dengan aplikasi *voice reader*.

Kata Kunci: ISAK 35, Entitas Nirlaba, Akuntansi Yayasan

ABSTRACT

This community service activity is in collaboration with the Raudlatul Makfufin Foundation (Taman Tunanetra). The aim of carrying out community service activities is to provide understanding and direction to Foundation Trustees and administrators regarding the importance of the ISAK 35 financial accounting standard in the process of recording, preparing and reporting the finances of foundation entities. An entity's financial reports should be transparent and accountable in order to provide relevant and reliable information to donors, regulators, beneficiaries and the public in general. The target of this activity is 15 supervisors and administrators, which will be carried out on November 5 2023. The methods used in this activity are lectures, tutorials, discussions and questions and answers. The results of this activity are that obstacles are still found, namely that recording and preparing financial reports is still very simple and does not fully follow the financial accounting standards that apply to non-profit entities and

for administrators, some of whom are blind, who are limited in using accounting applications that are not yet supported by voice applications. reader

Keywords: ISAK 35, Non-Profit Entities, Foundation Accounting

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang memiliki fungsi sebagai penyedia informasi kuantitatif, dan bersifat keuangan dalam suatu entitas usaha/ekonomi tertentu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan terbaik diantara berbagai pilihan alternatif tindakan yang ada. Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sector swasta/ komersial/ perusahaan dan akuntansi sektor public. Akuntansi sektor public atau disebut juga organisasi non laba ada beberapa jenis, salah satunya adalah Yayasan (Kholifah¹, 2023).

Organisasi non laba dibangun oleh sekelompok orang ataupun organisasi yang mengelolah yaitu oleh pihak swasta. Dana bersumber dari entitas non laba yang umumnya bersumber dari anggota ataupun para donatur (Melia, 2022). Organisasi nirlaba menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, maka pihak manajemen melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan setiap tahun. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang terhindar dari salah saji material, mudah dimengerti dan tentunya harus sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan (SAK No 1). Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh organisasi yang berorientasi laba, organisasi nirlaba juga memerlukan laporan keuangan guna mengetahui kegiatan organisasi dalam satu periode dan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan, penyaluran dana dan kegiatan sosial lainnya kepada pihak yang membutuhkan. (Devi dkk, 2018).

Organisasi nirlaba dalam melaksanakan program-programnya menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat, maka dari pertanggungjawaban laporan keuangannya harus bersifat terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat. Masing-masing organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang unik dan masih perlu dilakukan penyempurnaan berkaitan dengan standarisasi pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan juga akan disesuaikan dengan karakteristik organisasi namun tetap pada prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. (Devi dkk, 2018)

Salah satu bentuk organisasi nirlaba yang sering kita temui adalah yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Menurut UU No.16 Tahun 2001). Sebagai entitas nirlaba, yayasan memperoleh dana berupa sumbangan dari donatur, masyarakat, dan pemerintah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya. Walaupun para pemberi dana tidak mengharapkan pengembalian atas dana yang telah diberikan, pihak yayasan harus mampu membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transaksi dana, laporan keuangan tersebut sekaligus berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. (Devi dkk, 2018)

Yayasan *Raudlatul Makfufin* (Taman Tunanetra) yang terletak di Kampung Jati, Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan adalah lembaga khusus Tunanetra. Didirikan oleh Raden Halim Shaleh pada tanggal 26 November 1983. Sesuai dengan namanya, Yayasan *Raudlatul Makfufin* mempunyai spesialisasi dan prioritas pengajaran agama Islam kepada Tunanetra Muslim seluruh Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan Raden Halim Shaleh sebagai seorang pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang prihatin dengan kondisi tunanetra pada minimnya sarana belajar bagi kaum tunanetra, padahal kewajiban ibadah bukan hanya berlaku bagi orang yang sempurna tapi juga mereka yang cacat, sedang sarana pendukungnya sangat minim. Unit dan Lembaga yang terdapat pada Yayasan tersebut yaitu Pesantren Tunanetra, Sekolah Khusus Islam Terpadu, Unit Percetakan, Majelis Ta'lim Ikatan Jama'ah *Raudlatul Makfufin* dan Wakafin – Wahana Karya Yarfin (makfufin.id, 2023).

Saat pra survei terlihat pencatatan yang dilakukan *Raudlatul Makfufin* (Taman Tunanetra) terlihat masih melakukan pencatatan yang terfokus pada laporan mengenai pendapatan dan pengeluaran, serta aset yang dimiliki, sehingga dari temuan sementara, laporan keuangan dari *Raudlatul Makfufin* (Taman Tunanetra) belum menerapkan standar yang berlaku, karena hal tersebut Yayasan *Raudlatul Makfufin* (Taman Tunanetra) memerlukan penyusunan laporan keuangan terhadap apa yang telah terjadi selama ini, serta memberikan transparansi bagi publik atas sumbangan yang telah diberikan selama ini bagi Yayasan tersebut.

Untuk penerapan Yayasan dapat menerapkan transaksi komersial ISAK 35 tentang “penyajian laporan finansial entitas berorientasi nonlaba”, dimana menggantikan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 45 tentang “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba”. Hal ini dikarenakan

yayasan adalah entitas yang tidak berorientasi pada laba. Dari pemikiran di atas, penulis memberikan kajian terkait penerapan Inteprestasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang “penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba” untuk bisa diterapkan di Yayasan (Sahala Purba, 2023)

ISAK 35 ini sebelumnya menggantikan PSAK 45 per tanggal efektif 1 Januari 2020. Dengan begitu, maka disusunlah ISAK 35 yang mengatur tentang penyajian laporan finansial entitas berorientasi nonlaba yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia(DSAK IAI) sebagai pengganti PSAK 45. Sebagaimana ISAK 35 mengatur bentuk format dari laporan finansial yang berisi mengenai laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan posisi keuangan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. ISAK 35 ini tentunya juga mengatur bagaimana menyusun pencatatan dan pelaporannya. Meski begitu, masih banyak organisasi non laba yang belum mampu memahami standar pelaporan keuangan sehingga perlunya pelatihan (Setiawan & et al, 2021).

LITERATUR REVIEW

Akuntabilitas merupakan keharusandalam memberikan pertanggungjawaban dan melaksanakan tugas yang sudah diberikan dan bagaimana suatu organisasi tersebut memberikan suatu keterangan atau pertanggungjawaban kepada pihak yang memerlukan laporan (Mubin, 2018). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menunjukan suatu laporan atau catatan mengenai keuangan atau kegiatan yang menjelaskan terkait penyelenggaraan disuatu organisasi untuk dipertanggungjawabkan (Afifah, 2021).

Pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Dimana sebelumnya untuk organisasi nonlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) revisi 2017 yang sekarang telah menjadi ISAK 35. PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan, dimana perbedaan yang mendasar yaitu klasifikasi aset neto, yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan (with restrictions) akan mengurangi kompleksitas dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa

pembatasan (without restrictions), oleh karena itu akan membawa pemahaman yang lebih baik dan manfaat lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

Interpreasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) menjelaskan perincian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang telah disajikan seperti berikut: 1. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 menyatakan bahwa “Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam sendiri.” Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan aktivitas nonlaba 2. PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas nonlaba menyajikan laporan keuangannya. Entitas dengan aktivitas nonlaba dalam Interpretasi ini selanjutnya merujuk kepada entitas berorientasi nonlaba. 3. Karakteristik entitas berorientasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba.

Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 4. Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.(IAPI, 2020).

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2001 mengenai yayasan, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, seperti kemanusiaan dan keagamaan. Meskipun yayasan memiliki pengurus, Pembina, dan pengawas, tidak boleh terdapat pembagian hasil usaha kepada tiga pihak tersebut. Pengurus yayasan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan secara tertulis

yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan, kegiatan yayasan dan laporan keuangan. Jika menerima bantuan dari negara, luar negeri, atau pihak lain lebih dari 500 juta atau memiliki aset di luar harta wakaf lebih dari 20 milyar wajib untuk menjalani audit menurut Undang-undang No 28 tahun 2004 mengenai perubahan atas Undang-undang No 16 tahun 2001. Yayasan wajib menyusun laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan laporan tersebut harus diumumkan dalam surat kabar. Undang-undang Pajak Penghasilan menempatkan yayasan sebagai salah satu bentuk badan yang merupakan subjek pajak. (Dewi, 2023).

METODE PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberlanjutan program ini maka pelaksanaan kegiatan penerapan laporan keuangan yayasan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa langkah: pertama kegiatan dilakukan secara tatap muka dalam bentuk ceramah/ presentasi materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu dosen Akuntansi Prodi Akuntansi Universitas Pamulang, yang akan diikuti oleh kurang lebih 15 peserta yang terdiri dari pengurus dan Pembina Yayasan *Raudlatul Makfufin* (Taman Tunanetra). Sosialisasi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk entitas nirlaba. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan ISAK 35 pada penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba pada Yayasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Yayasan *Raudlatul Makfufin* (Taman Tunanetra) yang dilakukan pada hari Minggu, 5 November 2023 sebelum itu telah dilakukan serangkaian kegiatan, yaitu koordinasi dengan para pengurus dan Pembina Yayasan *Raudlatul Makfufin* (Taman Tunanetra) mengenai masalah baik secara teknis maupun praktis terkait pemahaman dan penyusunan laporan keuangan Yayasan dari hasil koordinasi tersebut ditemukan beberapa masalah yaitu :

1. Pada bukti transaksi (*voucher*) yang dimiliki oleh Yayasan kurang kuat, tidak adanya nomor urut *voucher* kas keluar/masuk, tidak adanya otorisasi dari pejabat berwenang.

2. Bendahara membuat bukti transaksi hanya mengandalkan Ms. Excel dalam pencatatan, tidak ada *back up* secara manual. Hal tersebut akan sulit *mentrace* data jika terdapat selisih.
3. Tidak adanya akun/pos-pos akun serta kode akun. Pencatatan dicatat dengan narasi saja.
4. Pada pencatatan Ms. Excel dibuat secara terpisah, satu menggunakan uang tunai dan satu lagi transaksi yang terjadi pada rekening bank. Namun hanya membuat *sheet* penerimaan dan pengeluaran dan aset yang dimiliki.
5. Pengelompokan transaksi dibuat namun tidak mempermudah pengerjaan pelaporan (misal: hanya mengelompokkan akun pendapatan dari donator tetap atau donator tidak tetap) bukan membuat akun dari transaksi tersebut.
6. Untuk pelaporan keuangan akhir dibuat secara manual, dengan membuka rincian yang dibuat dan tidak dikelompokkan secara pos-pos akun.



Gambar 4.1
Penyampaian Materi Oleh Narasumber

Pelaksanaan dilakukan sosialisasi dan penyuluhan. Narasumber menyampaikan materi terkait dengan tema secara teoritis dengan menyertakan contoh laporan keuangan entitas nirlaba serta program excel yang dapat digunakan untuk mempermudah para pengurus Yayasan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Para pengurus menyimak dengan seksama dan terjadi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan

narasumber. Dasi hasil kegiatan temuan yang didapat adalah aplikasi yang ditawarkan tim pengabdian memiliki kelemahan yaitu belum terskoneksi dengan aplikasi *voice reader* yang selama ini digunakan pengurus untuk mempermudah dalam menggunakan perangkat computer karena para pengurus Sebagian adalah penyandang tuna Netra. Maka dari hasil diskusi pada akhir sesi PKM disepakati akan dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan sebagai bekal pengurus untuk dapat menggunakan aplikasi akuntansi secara sistematis dan terintegrasi.



Gambar 4.2
Peserta PKM Yayasan Raudlatul Makfufin

KESIMPULAN

ISAK 35 pada dasarnya dibuat dalam rangka menciptakan kesetaraan laporan keuangan dari tiap-tiap organisasi nirlaba, karena dengan adanya kesetaraan maka akan memudahkan tiap-tiap organisasi nirlaba dalam melakukannya. Dilihat dari pentingnya laporan keuangan bagi sebuah organisasi – organisasi nirlaba terutama pada Yayasan maka perlu ada suatu aturan baku yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba, yakni laporan keuangan yang harus disajikan oleh organisasi nirlaba terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, laporan Perubahan Aset neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan..

SARAN

Perlu adanya dukungan secara berkesinambungan dari berbagai pihak agar entitas nirlaba dalam hal ini Yayasan dapat berkontribusi secara lebih baik lagi demi kebermanfaatannya untuk

lingkungan ataupun masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka salah satunya adalah perlu dibuatnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan publik secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. &. (2021). Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Isak 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintang. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 24-34.
- Dewi, N. K. (2023). Penerapan ISAK 35 dalam Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 13 No. 2., 286-298.
- Kholifah¹, U. W. (2023). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Entitas Yang Berorientasi Non Laba (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhasabah Wal Mahabbah Bitaharil Imam). *Jurnal ARMADA*.
- makfufin.id. (2023).
- Melia, Y. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nirlaba: Literatur Review. . *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 103.
- Mubin, N. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah atau Madrasah. Attaqwa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.
- Sahala Purba, 2. M. (2023). Penyuluhan Penerapan ISAK 35 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Non Laba Pada Panti Asuhan Di Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* .
- Setiawan, D. A., & et al. (2021). Pengelolaan Manajemen dan Keuangan Yayasan Yatim Piatu: Yayasan Pundi Amal Abadi Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan* 1(1), 15–20.